

BAB II

PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

(1800 - 1942)

2.1. Kedatangan Belanda di Indonesia

Pada abad XVI M persairan Indonesia kedatangan orang Eropa yaitu : orang Belanda, Inggris, Denmark dan Prancis; sebelum itu pada abad XIII telah datang juga bangsa Portugis dan Spanyol. Maksud kedatangan mereka (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dan lain-lain) ingin memperoleh rempah-rempah dengan murah.

Ada perbedaan antara Portugis dengan Spanyol dengan Belanda dan Inggris di Indonesia. Portugis dan Spanyol datang untuk menyiarkan agama Kristen disamping mencari keuntungan, sedang yang lainnya hanya berdagang.

Kedatangan Belanda ke Indonesia itu ada hubungannya dengan perubahan politik di Eropa.¹

Sejak lama pelaut-pelaut Belanda berlayar dari Portugis ke negeri Belanda untuk berdagang; mereka membeli rempah-rempah dipasar Portugis dan menjualnya dipasar Eropa. Orang Belanda tidak mau

¹Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 104.

berhubungan dengan orang Spanyol, karena mereka sedang bermusuhan. Pada tahun 1585 terjadi suatu peristiwa penting : negara Portugis dipersatukan dibawah Raja Spanyol.

Akibat dari perubahan politik tersebut pelaut-pelaut Belanda tidak lagi berdagang dengan pelaut-pelaut Portugis, sehingga terancam kehilangan mata pencahariannya.² Maka kini orang-orang Belanda terpaksa berusaha sendiri mencari jalan ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah tadi.³

Pada tahun 1595 empat kapal Belanda di pimpin Cornelis de Houtman berangkat ke Indonesia, pelayaran pertama itu berlangsung empat belas bulan lamanya dan pada tahun 1596 mereka sudah sampai di Bandar Banten. Kedatangan kapal-kapal Eropa sudah tidak asing lagi bagi orang Banten; asalkan pedagang-pedagang asing datang dengan maksud yang baik untuk berdagang; tentu akan diterima dengan tangan terbuka. Karena makin banyak kapal berlabuh di Banten, makin menguntungkan - bagi khazanah kesultanan. Tetapi hubungan baik dianta

² Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia - sis II, Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 104.

³ R. Soekmono, Sejarah Kebudayaan Indonesia III Jakarta, Yayasan Kanisius, 1973, Cet III, hal. 59.

fa Belanda dan Banten tidak tahan lama, karena sikap pe-
laut-pelaut Belanda yang kasar.⁴

Setelah timbul perselisihan antara Belanda dan
Banten akibat sikap Belanda tersebut, kapal-kapal Belan-
da disuruh meninggalkan Bandar Banten dan menembaki
pantai dengan meriam-meriamnya. Tindakan ini merugikan
pihak Belanda sendiri, karena perilakunya yang buruk
itu dengan cepat tersier kebandar-bandar lain dipantai-
pulau Jawa.

Akibat tindakan tersebut bandar-bandar diseluruh
pantai pulau Jawa menutup pintu perdagangan bagi Belan-
da. Dalam pelayarannya kearah timur kapal-kapal Belan-
da itu hanya sampai di Bali, kemudian mereka putar halu
an dan pulang kenegeri Belanda.

Dengan demikian mereka sudah menemukan rute pelayaran-
ke Indonesia. Setibanya dinegeri Belanda mengadakan -
persiapan untuk berlayar kembali ke Indonesia.⁵

Pada bulan Juni 1596 datang lagi Belanda di Ban-
ten. Kejadian ini mengejutkan orang Portugis; dalam
persaingan dengan Portugis, Belanda telah unggul karena

⁴Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Nasional In-
donesia II, Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 105.

⁵Nugroho Notosusanto, Sejarah Indonesia II, Ja-
karta, Depdikbud, 1975, hal. 106.

mereka tidak membawa persoalan agama seperti yang dilaksanakan oleh Portugis.⁶ Di Indonesia demikian pula pada tahun 1598, kapal-kapal Belanda sudah sampai lagi di Banten. Mereka diterima baik karena kali ini Belanda bersikap lebih hati-hati dengan orang Banten; karena kerajaan Banten baru saja mengalami perlakuan kurang baik dari orang Portugis. Dari Banten, kapal-kapal Belanda berlayar ke arah Timur dan singgah di Tuban, mereka diterima dengan baik. Kemudian pelaut-pelaut Belanda meneruskan ke Maluku dan disanapun kedatangan mereka disambut dengan senang hati. Apalagi di Ternate yang baru saja bersengketa dengan orang Spanyol dan Portugis; mereka diterima dengan penerimaan yang ramah.⁷

2.1.1. Belanda Mendirikan Kongsi Dagang (VOC).

Pelayaran kapal-kapal Belanda yang kedua itu mencapai sukses yang besar. Kapal-kapal mereka pulang ke negeri Belanda dengan muatan rempah-rempah yang banyak.

Sejak itu berbondong-bondong kapal Belanda berlayar ke Indonesia; hal ini menyebabkan banyaknya orang-orang Eropa datang ke Indonesia, yang menimbulkan persaingan antara Belanda disatu pihak dengan orang-orang Eropa dipihak lain semakin hebat, belum lagi persaingan

⁶Sagimun M., Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional, Inti Idayu Press, Jakarta, hal. 6.

⁷Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Nasional Indonesia II, Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 106.

diantara mereka sendiri. Karena itu pada tahun 1602 M orang Belanda mendirikan "Vereenigde Oost Indische Compagnie" atau Perserikatan perusahaan Hindia Timur, disingkat VOC; dalam sejarah Indonesia disebut Kompeni. Tujuan Kompeni adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia.⁸

VOC didirikan pada bulan Maret 1602 M atas persetujuan antara Staten General (Dewan Perwakilan) yang diwakili oleh pengacara Holland yang terkenal, Johan Van Olden Barneveldt dan para pengurus dari perusahaan dagang Holland dan perusahaan Zeeland yang telah dibentuk antara 1596-dan 1602 untuk berdagang di kepulauan Hindia Timur. Pada tahap perundingan-perundingan tersebut (15 Januari 1602) Olden Barneveldt mengemukakan bahwa ada dua sebab utama yang menyebabkan perlunya dibentuk persatuan perusahaan dagang; guna menimbulkan bencana pada musuh dan guna kegunaan tanah air.⁹

VOC terdiri atas enam kamar wilayah (kamers) yang meliputi wilayah perusahaan dagang yang lalu, masing-masing di Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Delft dan Middelburg.

⁸ Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Indonesia II Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 106.

⁹ CR. Boxer-Jan Kompeni, Sinar Harapan, Jakarta - 1983 Cet. I, hal. 9.

Pimpinan pusat merupakan suatu dewan pengelola atau majelis para pengurus, terdiri dari tujuh belas utusan (Heren XVII atau Tuan-tuan XVII), yang pada mulanya dipilih dari kalangan pimpinan perusahaan-perusahaan dagang yang lalu. Penetapan utusan (Heren XVII) ditetapkan atas dasar : delapan utusan dari Amsterdam, empat utusan dari Zeeland (Middelburg), satu dari setiap kamar yang kecil dan anggota yang ketujuh belas, dipilih dari utusan Zeeland atau dari salah satu kamar yang kecil. Heren XVII biasanya mengadakan pertemuan dua kali setahun : dalam musim semi dan dalam musim gugur.

Pertemuan tersebut diadakan secara bergiliran antara kedua kamar kepresidenan : di Amsterdam selama 6 tahun dan di Middelburg selama dua tahun.¹⁰

Dalam melaksanakan perdagangan di Hindia Timur, Kompeni sering mendapatkan perlawanan-perlawanan dan persaingan dagang dengan bangsa Eropa ; karena itu Heren XVII sebagai pengurus VOC dinegeri Belanda memutuskan untuk memberitahukan garis-garis besar tuntunan bagi kebijaksanaan yang harus diikuti oleh Gubernur Jenderal dan dewannya di Baravia.

Tuntunan tersebut berupa petunjuk yang meliputi

¹⁰ CR. Boxer, hal. 11-12.

hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan VOC, disebut *Punten en Artikelen in Form Van Generale Instructie* (soal-soal dan pasal-pasal dalam bentuk Instruksi umum); yang diputuskan pada tanggal 26 April 1650, di Amsterdam;¹¹ yang terdiri dari :

Pertama : penguasaan wilayah, dengan beberapa penaklukan di Pulau Banda dan daerah-daerah lain disekitarnya; juga di Taiwan dan Formosa yang merupakan salah satu residensi dari daerah-daerah penaklukan yang dilakukan oleh Kompeni.

Kedua : Monopoli perdagangan, antara lain dengan mengadakan kontrak-kontrak monopoli yang dibuat dengan raja Ternate dan Kepulauan Maluku serta distrik distrik di Amboina.

Ketiga : mengadakan perjanjian dengan raja-raja dan pangeran timur lainnya; dengan memberikan hak bebas sebagai pedagang, sebagaimana persetujuan yang diadakan dengan semua bangsa lain diizinkan untuk berdagang dinegeri mereka (Dinegeri Belanda) atas izin dari penguasa".¹²

Dengan ditetapkannya instruksi umum tersebut,

¹¹CR. Boxer, Jan Kompeni, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, Cet I, hal. 36.

¹²CR. Boxer, Jan Kompeni, hal. 36.

pada tahun-tahun pertama, hubungan Kompeni dengan Indonesia masih baik karena mereka masih sibuk menghadapi portugis. Tetapi di Aceh dan Madura, kompeni mulai mendapat tantangan dari bangsa Indonesia karena Kompeni sudah memperlihatkan nafsu serakahnya.

Setelah dikepalai oleh J.P. Coen, maka tujuan mereka makin jelas yakni menguasai rempah-rempah di Indonesia secara sendirian atau tunggal.

Cara dagang semacam itu dinamakan monopoli. Untuk memaksakan monopoli ini Kompeni mulai menguasai - pelbagai wilayah; baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktek demikian sudah barang tentu merugikan kerajaan-kerajaan Indonesia, sehingga dimana-mana mulai timbul perlawanan terhadap kompeni,¹³ seperti :

1. Pada tahun 1628-1629, Kerajaan Mataram dibawah Sultan Agung menyerang VOC di Batavia (yaitu nama yang diterima orang Belanda setelah Jayakarta di kuasai oleh VOC).
2. Banten dibawah Sultan Agung Tirtoyoso, mengobarkan perlawanan menentang VOC.¹⁴

¹³ Nugroho Notosusanto, Sejarah Indonesia II, Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 106.

¹⁴ Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia II, Jakarta, Depdikbud, 1987, hal. 128.

2.2. Beberapa Sisi Politik Penjajahan Belanda

2.2.1. Sisi Agama.

Menurut Steenbrink : Perkembangan Islam di Indonesia sangat maju, sejalan dengan itu umat Islam memahami dan mengamalkan ajarannya ditengah - masyarakat yang selama berabad-abad sebelumnya memeluk agama Hindu dan Budha. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan tarekat atau tasawwuf, yang terkonsentrasi tarekat Naqshabandi.

Gerakan itu mampu menggalang solidaritas - umat yang dapat membahayakan kekuasaan Pemerintah kolonial Belanda.¹⁵ Seperti; terjadinya pemberontakan di Garut (1919).

Melihat potensi umat Islam tersebut diatas, Belanda berusaha menguasai dan mengatur gerakan -gerakan tersebut melalui berbagai kebijakan dalam bidang kehidupan beragama, de-

¹⁵ A. Munir Mulken, Perubahan Prilaku Politik Dan Polarisasi Umat Islam 1965 - 1987, Jakarta, Rajawali Press, 1989, hal. 36.

ngen harapan agar kekuatan solidaritas -
tersebut dapat mendukung kedudukan Belen-
da di Indonesia.

Kebijakan pemerintah Belanda terhadap ke-
hidupan bergama dapat ditempuh dengan :

- a. Menempatkan kedudukan ulama sebagai khotib dan guru ngaji sebagaimana pende-
ta; karena itu pemerintah Belanda se-
lalu mengawasi imam dan khotib ketika-
memimpin gerakan-gerakan sosial.¹⁶
- b. Mengatur dan mengawasi terhadap jamaah haji, baik pada waktu berangkat atau -
selema berada di Mekkah maupun kembali
ketanah air.
- c. Mengangkat kedudukan umat yang kurang
kuat agamanya; penghulu dijadi-
kan hakim agama, karena

¹⁶ Ibid.

nya Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan ET. 7-12-1835 No. 6, Stastblad 1835, no. 58. Tugas pengadilan Agama : mengadili masalah perkawinan dan Perceraian serta warisan; tetapi jika adalah masalah-masalah sosial (sipil effect) diadili oleh Pengadilan biasa: Pengadilan Negeri.

- d. Imam masjid, diawasi dengan memberi gaji dari kas masjid dan keuangan itu diperoleh dari dana perkawinan (ordonansi 1895). Penghulu (hakim agama), juga diberikan gaji dari dana perkawinan dan ongkos perkara.¹⁷
- e. Dibidang hukum, Pemerintah Belanda membuat peraturan perkawinan (ordonansi yang sesuai dengan kehendak pemerintah Kolonial).¹⁸

2.2.2. Segi Pemerintahan.

2.2.2.1. Later Belakang.

Orang-orang Belanda datang ke Indonesia pada abad ke XVI, mula-mula bertujuan untuk bergang. Mereka mendirikan perusahaan dagang bernu

¹⁷ Ibid, hal. 37.

¹⁸ Ibid, hal. 42.

ma "Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Kompeni. Untuk menjamin laba yang besar, mereka menjalankan perdagangan monopoli. Artinya pedagang-pedagang lain, baik pribumi maupun asing, seperti Arab, Persia India, Inggris, Portugis, Spanyol dan Denmark tidak diberi kesempatan dengan bebas ikut berdagang dengan raja Indonesia.¹⁹ Raja-raja Indonesia hanya boleh berdagang dengan orang Belanda, ataupun dengan pedagang lainnya yang telah mendapat izin dari Kompeni. Sudah tentu raja-raja Indonesia tidak tunduk cara Belanda itu; tetapi karena dipaksa dengan kekuatan senjata raja-raja itu tunduk untuk mengikuti kemauan kompeni Belanda.

Kompeni mengikat raja-raja Indonesia dengan perjanjian yang merugikan. Makin lama kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia. Kompeni mempunyai pegawai dan angkatan-tentara yang semakin banyak; daerah kekuasaannya pun semakin luas. Tentu Kompeni membutuhkan biaya besar untuk memelihara pegawai dan tentaranya; biaya itu diambil dari penduduk. Pada zaman Kompeni,

¹⁹

Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Nasional Indonesia II, Jakarta, Depdikbud, 1975, hal. 133.

penduduk kerajaan-kerajaan diheruskan menyerahkan hasil bumi seperti : beras, lada, kopi, remper-rempah , kayu jati dan lain sebagainya kepada VOC.

Hasil bumi harus dikumpulkan pada Kepala Desa dan untuk setiap desa ditetapkan jatah tertentu.²⁰

Kemudian Kepala Desa menyerahkannya kepada-Bupati untuk disampaikan kepada Kompeni. Tentu saja kompeni tidak mendapatkannya dengan gratis, tetapi juga memberi imbalan berupa harga hasil bumi itu. Tetapi harga itu ditetapkan oleh Kompeni, dan tak ada tawar-menawar terlebih dahulu.

Lagi pula uang harga pembelian tidak sampai utuh ketangan petani didesa-desa. Biasanya uang itu sudah dipotong oleh pegawai-pegawai VOC maupun oleh Kepala-kepala Daerah pribumi.

Meskipun kompeninya dan Kerajaan-kerajaan kita mempunyai pegawai, tetapi jumlahnya masih amat sedikit; bila mana dibandingkan dengan keadaan sekarang. Keadaan dahulu berlainan dengan sekarang. Dahulu banyak urusan yang diserahkan kepada keluarga atau desa.²¹

Pendidikan, kesehatan, pekerjaan sosial, maupun

²⁰ Nugroho Notosusanto, Sejarah Indonesia II, Depdikbud RI, Jakarta, 1975, hal. 133.

²¹ Ibid, hal. 134.

pekerjaan umum diluar kota kerajaan atau Kabupaten diserahkan kepada keluarga dan penduduk didesa-desa. Bahkan untuk urusan kerajaan, Kabupaten atau desa, penduduk dapat dipanggil untuk menjalankan pekerjaan rodi, misalnya membuat dan memelihara jalan atau jembatan, membangun gedung dan menanggulangi bencana alam.²²

Pekerja rodi tidak memperoleh bayaran. Semua pekerjaan rodi itu maupun pengumpulan hasil bumi diatur oleh Kepala Desa dan Bupati. Jelas bahwa pada zaman dahulu, kekuasaan bupati itu besar. Apabila berhubungan dengan penduduk, Kompeni pasti melalui Bupati. Bagi petani didesa-desa, pekerjaan rodi maupun pengumpulan hasil bumi seringkali merupakan hal yang sangat memberatkan. Karena hal-hal itu dilaksanakan dengan cara berlebihan, sehingga para petani banyak menderita. Keadaan serupa itu berjalan hingga permulaan abad XIX.²³

2.2.2.2. Langkah-langkah Belanda Mengatur Pemerintahan.

Dengan masuknya kekuasaan Barat ke Indonesia, membawa perubahan dan kegoncangan kehidupan rakyat; sejak awal abad XIX Pemerintahan Belanda mulai mengadakan

²² Ibid, hal. 135.

²³ Ibid, hal. 135.

pembaharuan politik kolonial: dengan mengadakan pembaharuan politik, pemerintahan serta mempraktekkan sistem ekonomi baru.

Akibatnya timbul perubahan tata kehidupan di kalangan rakyat Indonesia : Pemerintah Belanda berniat menghapuskan kedudukan tradisional penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah.²⁴ Kedudukan penguasa pribumi menjadi merosot ; para Bupati atau penguasa pribumi menjadi pegawai pemerintah Belanda , yang ditempatkan dibawah pengawasan Pemerintah Kolonial. Hubungan rakyat dengan para Bupati terbatas pada soal administratif dan pemungutan pajak; hak - hak yang diberikan oleh adat telah hilang. Pemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapus dan diganti dengan gaji.

Upacara dan tata cara yang berlaku di Istana Kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.²⁵

Disamping pembaharuan politik pemerintahan, pemerintahan Belanda menerapkan langkah-langkah sistem-ekonomi baru : menggelakkan pemungutan pajak, meningkat

²⁴ Sagimen MD, dkk., Perlawanan dan Pengasingan Pergerakan Nasional, Jakarta, Inti Idayu Press, 1986 , Cet I, hal. 14.

²⁵ Ibid, hal. 14.

ken perdagangan hasil bumi; lahirnya buruh upahan, masalah pemilikan tanah dan penggarapannya, sistem penyewaan tanah dan praktek kerja paksa. Hal-hal ini dapat memperberat kehidupan penduduk pedesaan, sehingga kesejahteraan hidup semakin merosot dan mencapai tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam memungut pajak, kerja paksa, penyewaan tanah, telah menjadikan rakyat pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki tempat berlindung dan tempat untuk mengadu nasibnya.²⁶

Dengan berkembangnya kekuasaan kompeni di Indonesia, pada abad XVIII Pemerintah Belanda di Batavia mengambil langkah-langkah tertentu, menciptakan sistem pemerintahan baru; dengan mengadakan pembagian wilayah wilayah yang dikuasainya, ada yang diperintah secara langsung (direct rule) dan ada yang secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ialah kerajaan-kerajaan yang hanya cukup diikatnya dengan perjanjian-perjanjian saja.

Walaupun demikian keuntungan pemerintah Belanda

²⁶ Sagimun MD, dkk., Perlawanan dan Pengasingan Perlawanan Pergerakan Nasional, Jakarta, Inti Idayu-Press, 1986, hal. 14-15.

tidak sedikit. Contoh dari Indirect Rule ialah Mataram. Mataram merupakan kerajaan yang relatif luas. Dissat-saat menghadapi musuh atau menemui kesulitan dalam pemerintahan, Mataram meminta bantuan kepada Kompeni. Bantuan selalu diberikan; tetapi dengan syarat bahwa Mataram harus memenuhi isi perjanjian yang disodorkan oleh Kompeni. Sebagai imbalannya Mataram diberi hak untuk berdiri sendiri tetap sebagai Kerajaan; hanya saja kerajaan ini dalam hal-hal tertentu harus tunduk kepada Kompeni; pegawai-pegawai yang memerintah Mataram harus saja tetap orang-orang Mataram dan dipimpin oleh residen Belanda yang didukung oleh beberapa Batalyon tentara kompeni untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kerajaan dari dalam.²⁷

Daerah-daerah tersebut diatas dinamakan daerah yang dikuasai secara tidak langsung. Politik ini pada umumnya dipakai di daerah-daerah pulau Jawa. Disamping indirect rule, ada juga daerah yang diperintah secara langsung (direct Rule). Artinya langsung dikuasai: Batavia, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya. Di daerah ini, pengangkatan pegawai itu dilakukan oleh Kompeni sendiri.²⁸

²⁷ R. Pitono, Drs, dkk., Sejarah Indonesia II, Malang, Utams, 1967, hal. 59-60.

²⁸ Ibid, hal. 60.

VOC bergerak di Indonesia dari tahun (1602 - 1800 M); karena peristiwa ekonomi dan politik, maka VOC pada tahun 1800 (tepat pada tanggal 31-12-1799) dibubarkan. Dalam peristiwa ekonominya, VOC pada akhir hidupnya banyak sekali memiliki hutang yang tidak mungkin dapat dilunasi dalam waktu yang singkat. Korupsi dari pegawainya yang merajalela, peperangan-perang yang dilakukan oleh Belanda terlalu banyak memakan biaya, banyak sekali membawa kesulitan bagi badan swasta itu. Didalam peristiwa politiknya : VOC. nasibnya sangat ditentukan oleh persoalan kehidupan politik dinegeri Belanda sendiri :

Pertama :

Pada akhir abad ke XVIII, terjadilah perubahan pemerintahan dinegeri Belanda; sistem kerajaan diganti dengan sistem republik. Republik ini bernama *Bataafsche - Republik* yang politiknya mengekor kepada Prancis.²⁹

Hal ini tercantum dalam buku sejarah Indonesia, bahwa pada akhir abad ke XVIII yaitu pada tahun 1795M. Partai Patriot Belanda yang anti raja (William III) atas bantuan Prancis berhasil mengadakan Coup 'd'etat. Raja Belanda William III melarikan diri ke negeri Inggris dan di negeri Belanda dibentuklah suatu pemerintah

²⁹ Ibid, hal. 63-64.

an Republik dengan nama Batasafsche Republik.
Republik ini pro Prancis dan menjadi boneka Prancis (Napoleon Bonaparte).

Raja Belanda dan pengikutnya melarikan diri membentuk pemerintahan pelerian di Inggris dan sikapnya - pro Inggris, padahal pada masa itu Inggris dan Prancis merupakan dua negara yang sedang bermusuhan dengan hebatnya.

Suatu hal yang menguntungkan bagi Belanda (Republik ini), adalah bahwa kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia pro kepada Republik; walaupun banyak oknum-oknum dan pegawai lainnya di Indonesia bersikap anti Prancis.

Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg (1801 - 1804), sebagai ganti Gubernur Jenderal Overstraten.

Untuk mengatur Indonesia kembali, maka timbul pertentangan politik antara aliran konservatif dengan aliran-liberal yang diwakili oleh tokoh-tokoh Nederburg dan Van Hogen Harp.³⁰

Kedua :

Wilayah jajahan yang ada di Indonesia yang resminya di

³⁰ Ibid., hal. 65.

kusasi oleh kongsi dagang itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi; sebab wilayah ini langsung menjadi musuh Inggris. Inggris yang berpangkalan di India siap menyerang Indonesia dibawah pemerintahan Batavische Republik yang pro kepada Prancis.

Berdasarkan pertimbangan politik; bahwa VOC yang rusak ekonominya itu tidak akan mampu menghadapi ancaman Inggris di India (Calcuta).

Dengan demikian VOC dibubarkan, di ganti oleh Republik Batavische.³¹

Sejak saat itu Indonesia menjadi tanah Kolonial (1800-1942).

Sejak bubaranya VOC tahun 1800, merupakan babak baru dimulainya pemerintahan Kolonial Belanda : Indonesia secara resmi dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

³¹ Ibid, hal. 64.

da (Batavische Republiek) dibawah Gubernur Jenderal Johannes Siberg.

Sejak bubarnya VOC berdasarkan pertimbangan politik untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman Inggris di India, maka Indonesia harus dikuasai dan diperintah oleh badan pemerintahan resmi : pemerintahan Kolonial Belanda.³²

Permusuhan Inggris dan Prancis terus meningkat. Untuk menundukkan Inggris, Negeri Belanda yang dekat hubungan geografis dengan Inggris dijadikan Propinsi Prancis dan Republik Batavische di bubarkan, diganti dengan Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda) dengan Louis Napoleon sebagai rajanya; orang ini saudara kaisar Napoleon Bonaparte.

Perubahan politik dinegeri Belanda itu berpengaruh yuridis di Indonesia. Indonesia jatuh dalam kekuasaan Prancis; tetapi penguasa Indonesia masih tetap dari orang-orang Belanda yang lama. Sehingga pada saat itu penguasa di Indonesia adalah dari unsur Belanda - Prancis..

³²R. Pitono, dkk, Op.Cit., hal. 64.

Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis merasa khawatir kehilangan jajahan Belanda di Indonesia jatuh ketangan Inggris. Maka diangkatlah orang yang kuat memikul beban yang berat, serta berpengalaman di bidang militer : Daendles; ia ahli hukum dan jenderal dan diangkat sebagai Gubernur Jenderal oleh Napoleon Bonaparte. Gubernur jenderal ini bertugas di Indonesia pada tahun (1808-1811); mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.^{33/}

Usaha Daendles dalam mempertahankan pulau Jawa meliputi :

Pertama : bidang militer. Membuat pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung kulon, dengan mengerahkan rakyat dalam bentuk kerja rodi; akibatnya banyak rakyat yang mati karena wabah penyakit, kelelahan dan kekurangan makan. Pembangunan pangkalan ini yang berhasil di Surabaya. Sedang diujung-kulon tidak berhasil, karena sikap rakyat dan perdana Menteri Belanda yang tidak mau kerja paksa untuk keperluan itu.

Diseamping pangkalan angkatan laut; Daendles juga membangun jalan raya Anyer Panarukan yang tidak hanya bermanfaat bagi pertahanan saja, tetapi juga se-

bagai lalu lintas perekonomian. Pembangunan jalan-
ini bukan menciptakan jalan baru tetapi pada dasar-
nya jalan yang sudah ada berabad-abad lamanya di per-
baiki, sehingga lebih mudah dilalui.³⁴

Kedua : Bidang politik. Dalam lapangan admi-
nistresi pemerintahan, pulau Jawa dibagi menjadi 9
profektur; yang setiap profektur dikepalai oleh se-
orang profek, sistem ini adalah model Prancis.³⁵

Ketiga : Bidang ekonomi.

1. Menambah kas negeri, dengan mengambil langkah-lang-
kah :

- meneruskan warisan VOC dengan mencari penghasilan
melalui sistem kontingenten (pajak in natura)
dan sistem penyerahan wajib lebih ditingkatkan ;
cara ini masih tetap dipertahankan agar mudahmen
dapatkan keuangan.

2. Penjualan tanah pertikelir dilaksanakan : Betawie,
Jawa Tengah dan Jawa Timur : seperti tanah Panary-
ken dan Probolinggo dibeli Cina : Han Tin Ko.
dan Buitenzorg (Bogor) dan istenanya sejak dulu
hingga Daendles menjadi milik pribadinya, di jual

³⁴ R. Pitono, Drs, dkk., Sejarah Indonesia II,
Malang, Utama, 1967, hal. 68.

³⁵ Ibid, hal. 67.

kepada pemerintah dan hasilnya tidak sedikit untuk kepentingannya sendiri.³⁶

2.2.2.3. Siasat Belanda mencampuri urusan Kerajaan.

Tindakan kekerasan Daendles terhadap rakyat menimbulkan kebencian dan permusuhan dimana-mana (diti-nah jejenan); untuk melaksanakan siasat ini Daendles, mengambil langkah atau tindakan terhadap raja - raja dan rakyatnya; dengan mencampuri urusan kerajaan untuk tunduk kepada Daendles; seperti yang terjadi pada Kerajaan Cirebon pada tahun 1809, dinyatakan oleh Daendles sebagai daerah miliknya pemerintah (1809). Sultan Cirebon akan diangkat sebagai pegawai negeri, walau demikian dia diperbolehkan oleh Daendles memakai gelar Sultan. Kemudian Cirebon dijadikan daerah otonom : Kerajaan itu dipecah menjadi satuan-satuan kecil untuk mengurangi dan menghilangkan kekuasaan sultan terhadap rakyatnya.³⁷

Demikian pula di Kerajaan Jogjakarta telah lama ada pergolakan politik, yang dipengaruhi oleh Belanda. Pergolakan politik itu hasilnya dapat memecahkan dua kelompok dalam kerajaan :

³⁶ Ibid, hal. 69.

³⁷ Ibid, hal. 70.

1. Politik yang anti Belanda, yang dipimpin oleh raja sendiri; Hamengku Buwono II (1792-1810) , yang terkenal dengan nama Sultan Sepuh, dan dibantu oleh Nata Kusuma.
2. Kelompok yang pro Belanda, yang dipimpin oleh patih Danurejo.

Pergolakan politik itu diakhiri dengan kemenangan dipihak kelompok anti Belanda, patih Danurejo dipecat oleh raja dari jabatannya.³⁸

Kemenangan kelompok anti Belanda di Jojjakarta, mengkhawatirkan pemerintah Belanda. Sussana Kraton yang panas ini dipeka oleh Daendles dengan tuntutan - yang bukan-bukan; untuk memenangkan kelompok Pro Belanda di Kraton.

Pada tahun 1810 dengan jumlah serdadu yang besar (1500 orang), Daendles mengepung Jogjakarta, Sultan di paksa untuk menyerahkan kepada Belanda :

1. Orang-orang yang anti Belanda, terutama Pangeran Nata Kusuma.
2. Patih Danurejo yang dulu dipecat harus diangkat kembali kepada kedudukan semula.

Siasat Daendles terhadap raja-raja; yang selalu

³⁸ Ibid., hal. 70.

mengadakan konflik/perlawanan dengan mereka, hanya-
lah menghasilkan dendam dan kebencian belaka. Politik
ini bertentangan dengan instruksi yang diberikan Raja
Belanda Louis Napoleon kepadanya : supaya berbudi baik
kepada raja-raja Indonesia.

Kesalahan politik ini menimbulkan diteriknya De
endles dari Indonesia sebagai pejabat Gubernur jen-
dral.³⁹

Dengan demikian masa jabatan Deendles, sebagai
Gubernur jenderal telah meninggalkan warisan berupa ke-
gelisahan serta keresahan politik dikalangan Kraton
Jogjakarta : struktur pemerintah berupa, Sultan tua
tetap tinggal di Kraton sebagai raja, sedang pengende-
li/pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh anak laki-la-
kinya (Sultan Hamengkubuwono III).

Pembuangan Pangeran Nata Kusuma bersama anak
laki-lakinya; sangat menyedihkan hati penguasa (raja)
tua, yang mengakibatkan sikap curiga kepada diri pa-
ngeren wakil raja serta ketua menteri : Patih Danurejo
II (1799-1811), diduga ia memburuk-burukkan dan menga-
dukan mereka kepada pihak Belanda.⁴⁰

³⁹ R. Pitono, Drs, dkk., hal. 70-71.

⁴⁰ Peter Carey, DR., Asal-usul Perang Jawa, Pus-
taka Azet, Jakarta, 1936, hal. 35.

Pemerintahan kolonial Belanda periode 1900-1925 mengalami banyak kemajuan-kemajuan dilapangan pemerintahan :

1. Sistem Desentralisasi.

Pada tahun 1903 diumumkan UU Desentralisasi yang menciptakan dewan-dewan lokal, yang berwenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-bangunan umum. Sehingga pada tahun 1905 didirikan Dewan Kota: di Jakarta, Jatinegara, Bogor. Ketua dan anggotanya mayoritas orang Belanda.⁴¹

Wujud Desentralisasi; terbentuknya propinsi, dan Kabupaten sebagai daerah otonomi.

2. Perubahan organ-organ pemerintahan.

Timbulnya propinsi dan Kabupaten, dibentuk pula organ-organ pemerintahan yang lain : didirikan Departemen pertanian (1904) dan Departemen Perusahaan Negeri (1911).⁴²

3. Perbaikan kesehatan rakyat dan emigrasi. Dalam bidang kesehatan: pemerintah Belanda memberantas wabah penyakit menular, seperti : Pes, kolera dan malaria, Disamping itu untuk mengurangi kepadatan penduduk dilakukan migrasi (transmigrasi), maka pada tahun 1911, di ad a k a n transmigrasi

⁴⁰ Nugroho, Notosusanto, Sej. Nasional Indonesia, JI.III, JKT, Balai Pustaka, 1987, hal. 32.

⁴¹ Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia III, hal. 32.

keluar pulau Jawa, seperti : ke Deli (Sumatera utara) dan ke-Lampung.

4. Perbaiki pendidikan.

Dilapangan pendidikan, pemerintah Belanda memperluas sarana belajar (pengajaran) baik disekolah maupun kejuruan dalam berbagai tingkat seperti :

a. Pada tahun 1902 didirikan Perguruan tinggi pertama di Bogor.

b. Pada tahun 1909 didirikan perguruan tinggi hukum.

43

2.2.3. Segi Ekonomi.

2.2.3.1. Latar Belakang.

Masuknya kekuasaan Belanda ke Indonesia membawa perubahan dan kegoncangan kehidupan rakyat Indonesia: sejak awal abad ke XIX penguasa Belanda mulai mengadakan pembaharuan politik Kolonial; disamping pembaharuan di bidang pemerintahan; Belanda juga mempraktekan sistem ekonomi baru.⁴⁴ Akibat politik ekonomi baru ini timbul perubahan-perubahan tata kehidupan dikelengen rakyat Indonesia :

1. Pemerintah Belanda berniat menghilangkan kedudukan -

43

Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta, Depdikbud, Balai Pustaka, 1987, hal.33.

44

Sagimun MD, dkk., Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional, Jakarta, Inti Ideyu Press, 1986 hal. 14.

- tradisional penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah.
2. Kedudukan penguasa pribumi merosot, bupati dan penguasa pribumi yang lain menjadi pegawai pemerintah Belanda dan ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah kolonial.
 3. Hubungan rakyat dengan para bupati terbatas hanya pada urusan administratif dan pemungutan pajak.
 4. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang : kepemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan di hapus dan diganti dengan gaji; upacara yang berlaku di istana kerajaan disederhanakan.
 5. Masuknya ekonomi uang menambah beban berat rakyat pemungutan pajak yang terlalu tinggi, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, penyewaan tanah, praktek kerja paksa, dan tanam paksa.

Perubahan tata kehidupan rakyat itu menimbulkan kemiskinan yang tinggi, sebagai akibat praktek pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, telah menjadikan rakyat dipedesaan menjadi lemah ekonominya.⁴⁵

⁴⁵ Sagimun MD, dkk., Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional, Inti Ideyu Press, Jakarta, 1986, hal. 14-15.

2.2.3.2. Pelaksanaan kerja rodi dan penyerahan wajib.

Timbulnya tanah partikelir sebagai akibat dari praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh orang Belanda sejak zaman VOC dan berlanjut sampai abad XIX. Pada mulanya tanah partikelir berasal dari pemberian VOC kepada orang-orang yang berjasa dalam menjaga ketentraman suatu daerah seperti daerah sekitar Jakarta.

Adapun yang berasal dari milik pribadi seorang Gubernur Jenderal dan berturut-turut dimiliki oleh penggantinya. Daerah partikelir semacam itu terdapat sekitar Bogor. Di tempat lainnya tanah partikelir berasal dari penjualan VOC kepada orang-orang swasta.⁴⁶

Kebanyakan yang menguasai tanah partikelir adalah orang-orang asing. Orang Eropa dan orang Cina. Mereka bertindak sebagai tuan tanah yang sekaligus menguasai penduduk yang tinggal di atas tanahnya. Para Tuan tanah itu mempunyai hak untuk menuntut penyerahan tenaga dan hasil tanahnya dari mereka. Pemerintah memang berhak untuk menguasai daerah itu, tetapi dalam prakteknya pemerintah tidak dapat mencegah penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh tuan ta-

⁴⁶ Ibid, hal. 16.

nah. Pemerintah terlalu lemah untuk bertindak tegas terhadap perbustan-perbustan mereka. Berbagai peraturan telah diadakan untuk melindungi para penduduk.

Meskipun demikian perbustan sewenang-wenang tetap terjadi. Tindakan semacam itu telah menderang-mendeging, dilingkungan tanah partikelir. Tidak mengherankan kalau kemudian menimbulkan kegelisahan dikalangan para penduduk. Akibatnya timbul kerusuhan terus menerus.

Tindakan sewenang-wenang dari tuan tanah kepada rakyat, untuk memperbesar keuntungan sebesar-besarnya, dari tanah yang dikuasainya. Cara yang bisa dilakukan : menarik hasil tanah secara langsung dari petani yang menggarapnya, mengumpulkan uang sewa dan bagian - dari hasil panen, menarik pajak dan pengerahan tenaga para penduduk.⁴⁷

Langkah-langkah tuan tanah dalam melaksanakan - praktek penindasannya ditinjau partikelir memiliki beberapa kewajiban :

1. Mengangkat petugas khusus untuk memungut : pajak , hasil tanah, dan pengawasaan tanah. Tanah itu menghasilkan padi, kopi, teh dan coklat.
2. Menciptakan rakyat sebagai budak belian, yang kehilangan hak azasi dan kebebasan ekonomi : hidup mere

⁴⁷ Ibid, hal. 16.

ke tergantung kepada tuan tanah dan dibebani kewajiban yang berat.

3. Memberi kewajiban yang berat pada para petani: membayar cukai (pajak) hasil bumi sebesar 1/5 dari hasil panennya.
4. Mengerahkan tenaga penduduk untuk melakukan kerja rodi (kerja paksa) selama lima hari setiap bulan; kerja rodi ini sering disebut kerja kompenian. Kerja rodi ini tidak hanya dilakukan ditanah partikelir, tetapi dilaksanakan ditanah yang dikuasai pemerintah. Kerja rodi yang dibebankan kepada para penduduk ditanah partikelir disebut kerja kompenian, karena para tuan tanah menganggap dirinya bagian dari pemerintah Belanda.⁴⁸

Hak-hak tuan tanah ; dapat berbuat sewenang -
wenang :

1. Memaksakan segala macam kehendaknya kepada para petani : menggerakkan tenaga kerja tanpa upah.
2. Mengusir para penduduk yang tidak membayar pajak , hutang dan yang tidak memenuhi pekerjaan yang dimintanya.

Dengan adanya sifat kesewenangan dari para tu-

⁴⁸ Ibid, hal. 17.

an tanah ini, keadaan penduduk ditengah partikelir sangat buruk timbul rasa dendam dan kebencian terhadap sistem pungutan pajak atau cukai serta kerja paksa.

Akibatnya rakyat bangkit menentang praktek yang dilakukan oleh tuan tanah dan pelayannya, berupa kerusakan-kerusakan atau kerusuhan dalam masyarakat; sebagian besar karena pemungutan cukai. Bentuk pergolakan ini disebut kerusakan cukai.⁴⁹

Suatu contoh praktek penindasan oleh tuan tanah kepada rakyat terjadi pada penduduk ditengah partikelir Ciomas yang terletak di Lereng Gunung Salak, bagian Utara (Jawa Barat).

Praktek-praktek penindasan yang dibebankan kepada rakyat oleh tuan tanah :

1. Beban berat dalam pembayaran : cukai, pekerjaan rodi, penyerahan hasil pekerjaan.
2. Perbudakan : memaksa rakyat mengangkat padi dari tempat panen kelumbung tuan tanah yang jauhnya 15 atau 18 km. tanpa upah.
3. Pengorbanan tenaga kerja wanita dan anak-anak, yang diwajibkan bekerja selama sembilan hari setiap bulan.

⁴⁹ Ibid, hal. 17.

Dengan beban yang sangat berat ini, banyak penduduk yang tidak tahan pindah ketempat lain untuk menghindari diri. Kesengsaraan dan ketidak-puasan terhadap kebijakan pemerintah Belanda dan tuan tanah, menimbulkan pemberontakan pada tahun 1886 M, di Ciomas - dibawah pimpinan Moh. Idris.⁵⁰

Sistem kebijakan VOC yang penuh paksaan ditentang oleh Van Hogendorp, ia menginginkan : para petani diberi kebebasan untuk menanam tanahnya dengan tanaman yang dapat mereka jual sendiri, hendaknya jangan dipaksa menanam tanaman tertentu untuk pemerintah kolonial saja. Para petani harus bebas menjual hasil tanamannya kepada siapapun.⁵¹

2.2.3.3. Sistem pajak tanah atau sewa tanah (Land Rent)

Pendapat atau usul van hogendorp pada pemerintah VOC tersebut diatas, dilaksanakan oleh Raffles pada saat berkuasa di Indonesia (1811-1816); cara Raffles dalam memperbanyak keuangan negara disebut sistem sewa - tanah, ia beranggapan bahwa semua tanah itu milik negara dan petani hanya menyewa. Oleh sebab itu petani harus membayar pajak atas penggunaan tanah negara.

⁵⁰ Ibid, Hal. 17-18

⁵¹ Nugroho Notosusanto, dkk. Indonesia, Dekdikbud 1973 Hal. 136

Pajak serupa itu disebut pajak sewa tanah atau Land Rent (dalam istilah bahasa Inggris).⁵² Sistem ini ternyata gagal, karena :

1. Menemui kesulitan untuk menetapkan jumlah pada pajak yang tetap tiap petani : mengukur tanah dan meneliti keuburannya.
2. Tidak ada pegawai khusus untuk pengukuran tanah akibatnya petani dikenakan pajak secara kira-kira saja dan mungkin makin lama jumlah pajak yang ditetapkan jauh lebih besar.
3. Soal waktu : pada permulaan abad ke XIX masyarakat pedesaan Indonesia belum waktunya untuk menjalankan sistem pajak tanah serupa itu. Karena sistem yang diterapkan oleh Raffles ini diilhami kehidupan pedesaan di India, sedang di-Indonesia merupakan desa tertutup.
4. Kurang adanya penelitian sosial dipedesaan Jawa : seperti pada zaman VOC rakyat Indonesia masih hidup dalam masyarakat desa yang tertutup , artinya hubungan dengan dunia luar belum banyak mengetahui, mereka langsung dibawah pimpinan bupati dan tunduk kepadanya; bupati biasanya ke

⁵² Ibid, hal. 137.

turunan para bangsawan dan mempunyai tanah luas yang dikerjakan para petani. VOC tidak memerintah rakyat, mereka hanya berhubungan dengan Bupati agar keperluannya dijamin. Berbeda dengan desa-desa di India; sudah mengenal lalu lintas uang, sudah mengenal dunia perdagangan dan internasional dan bukan desa tertutup. Dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri.⁵³

Pada tahun 1900-1925, Pemerintah Belanda mengambil langkah-langkah baru dalam bidang ekonomi :

1. Perbaikan pertanian.

Dengan dibentuknya propinsi-propinsi dan kabupaten-kabupaten diseluruh nusantara, dibentuk pula organ-organ pemerintahan yang baru di bidang ekonomi :

- a. Dinas pertanian.
- b. Dinas perikanan.
- c. Dinas kerajinan.
- d. Dinas kesehatan.
- e. Dinas Peternakan.

2. Pembangunan Irigasi.

⁵³ Ibid, hal. 137-138.

Dalam bidang pertanian, pemerintah Belanda membangun sistem irigasi yang luas ; irigasi Benares di Jawa Timur.

3. Pembangunan sarana kredit.

Untuk kepentingan petani didirikan bank- bank kredit pertanian, seperti bank padi, bank simpanan , dan rumah-rumah gadai.⁵⁴

⁵⁴ Nugroho Notosusanto, dkk., Sejarah Nasional Indonesia III, Jakarta, Depdikbud Balai Pustaka, 1987 , hal. 32-33.